



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN MONEV KINERJA TRIWULAN I, II, III, IV

2024

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Triwulan ini	% capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya Implemementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B					0,00	0,00	Nilai LHE SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu sampai bulan Juni 2024 belum keluar hasilnya.	Menindaklanjuti hasil LHE SAKIP yang belum keluar hasilnya sampai bulan juni 2024, di harapkan utk selalu koordinasi dan menanyakan perkembangan hasil LHE SAKIP kepada Inspektorat, sehingga di Triwulan III LHE SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu keluar hasilnya.
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85	82,83				82,83	97,44	Data penerima Bantuan Pusat (kementerian) masih perlu di perbaiki	Melakukan verifikasi dan validasi perbulan melalui Aplikasi SIKSNG serta melakukan pelatihan terhadap Operator SIKSNG yang ada di Desa
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	74	0%				-	-	Terdapat 4 Kasus yang masuk, Namun pada Triwulan I 2024 belum ada kasus yang terselesaikan karena masih dalam proses putusan pengadilan.	dalam proses putusan pengadilan negeri
				159,00				82,83	52,09		

Putussibau, 25 April 2024
 Kepala Dinas Sosial,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Kapuas Hulu

 Martha Banang, S.H., M.M.
 Pengusaha Muda
 NIK 19630125 199203 2 006

**DATA PERHITUNGAN REALISASI KADIS
TRIWULAN 1**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA		
1	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah yang mendapat PKH	8.772	Orang
		jumlah peserta PBI JKN triwulan 1	76.472	Orang
		Jumlah DTKS	102.918	Orang



Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Kapuas Hulu

MARTHA BANANG, SH.MM
NIP. 19651123 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78711
Laman: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
Pos-el : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

REKAPAN DATA KASUS YANG TERSELESAIKAN Sampai Dengan TW 1

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KEKERASAN	TGL PELAPORAN DI KEPOLISIAN	TGL PUTUSAN TETAP DI PENGADILAN NEGERI
1.	Anastasia Nuraica	Silat Hilir	Seksual (Anak)	6 Januari 2024	Proses Putusan
2	Indah	Putussibau Utara	Seksual (Anak)	15 Februari 2024	Proses Putusan
3	Anggun Risqia	Jongkong	Seksual (Anak)	21 Februari 2024	Proses Putusan
4	Mariana Dia	Bika	Seksual (Anak)	26 Februari 2024	Proses Putusan
5	Utami Budi Atri	Putussibau Selatan	Fisik (Dewasa)	1 Maret 2024	Proses Putusan

a.n Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu



EMERITA LALONG, S.Pd

Pembina

NIP. 1960316 199303 2 005

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Triwulan ini	% capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya Impelementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B		0			0,00	0,00	Nilai LHE SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu sampai bulan Juni 2024 belum keluar hasilnya.	Menindaklanjuti hasil LHE SAKIP yang belum keluar hasilnya sampai bulan juni 2024, di harapkan utk selalu koordinasi dan menanyakan perkembangan hasil LHE SAKIP kepada Inspektorat, sehingga di Triwulan III LHE SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu keluar hasilnya.
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85	82,83	1,23			84,05	98,89	Data penerima Bantuan Pusat (kementerian) masih perlu di perbaiki	Melakukan verifikasi dan validasi perbulan melalui Aplikasi SIKSNG serta melakukan pelatihan terhadap Operator SIKSNG yang ada di Desa
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	74	0%	5,88			5,88	7,95	Terdapat 10 kasus yang masuk dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 2 2024, dari 10 kasus yang masuk baru 1 kasus anak(seksual) sudah terselesaikan dan 9 kasus masih dalam proses pengadilan	dalam proses putusan pengadilan negeri
			159,00					89,94	56,56		

Putussibau, 30 Juli 2024

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu



Martua Rahang, S.H., M.M

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19651123 199203 2 006

**DATA PERHITUNGAN REALISASI KADIS
TRIWULAN II**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA		
1	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah yang mendapat PKH	-	Orang
		jumlah peserta PBI JKN triwulan 2	1.262	Orang
		Jumlah DTKS	102.918	Orang



Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Kapuas Hulu

MARTHA BANANG, SH.MM
NIP. 19651123 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78711
Laman: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
Pos-el : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

REKAPAN DATA KASUS YANG TERSELESAIKAN Sampai Dengan TW 2

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KEKERASAN	TGL PELAPORAN DI KEPOLISIAN	TGL PUTUSAN TETAP DI PENGADILAN NEGERI
1	Anastasia Nuraica	Silat Hilir	Seksual (Anak)	6 Januari 2024	Proses Putusan
2	Indah	Putussibau Utara	Seksual (Anak)	15 Februari 2024	Proses Putusan
3	Anggun Risqia	Jongkong	Seksual (Anak)	21 Februari 2024	Proses Putusan
4	Mariana Dia	Bika	Seksual (Anak)	26 Februari 2024	Proses Putusan
5	Utami Budi Atri	Putussibau Selatan	Fisik (Dewasa)	1 Maret 2024	Proses Putusan
6	Chelsie	Suhaid	Seksual (Anak)	17 April 2024	Proses Putusan
7	Amalia Wiguna	Putussibau Selatan	KDRT	8 Mei 2024	Proses Putusan
8	Rismayana	Bunut Hilir	Seksual (Anak)	11 Mei 2024	Proses Putusan
9	Tiwi	Kalis	Seksual (Anak)	13 Mei 2024	(Selesai) 30 Mei 2024
10	Susanti	Mentebah	Seksual (Anak)	12 Juni 2024	Proses Putusan

a.n Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu



EMERITA LALONG, S.Pd

Pembina

NIP. 1960316 199303 2 005

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

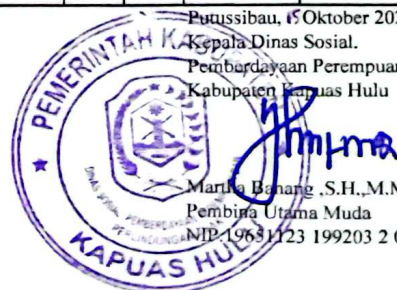
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Triwulan ini	% capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya Impelementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B		0	B		100,00	100,00	Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2023 tgl 21 Juni 2024 perolehan 61.40 kategori B (Baik)	Menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam rangka penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dan efektif.
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85	82,83	1,23	1,38		85,43	100,51	Data penerima Bantuan Pusat (kementerian) masih perlu di perbaiki.	Melakukan verifikasi dan validasi perbulan melalui Aplikasi SIKSNG serta melakukan pelatihan terhadap Operator SIKSNG yang ada di Desa
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	74	0%	5,88	23,5		29,41	7,95	- Terdapat 11 kasus yang masuk dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2024, dari 11 kasus yang masuk baru 5 kasus sudah terselesaikan terdiri 1 kasus Dewasa(KDRT) dan 4 Kasus Anak. Masih ada 6 kasus dalam proses Pengadilan Negeri	- Memfolow up dan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri terkait Putusan Pengadilan
			159,00					114,84	72,23		

Putussibau, 15 Oktober 2024

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

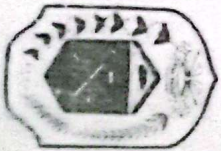
Kabupaten Kapuas Hulu



Martha Banang, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19681123 199203 2 006

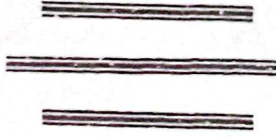


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Nomor 05 Putussibau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716
Telepon (0567) 21133, Faksimile (0567) 21133

Laman : Inspektorat kapuashulukab.go.id, Pos-el : Inspektorat@kapuashulukab.go.id

LAPORAN



TENTANG

**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

NOMOR : 700.1.2.7/108/LHE/INKAB/IB1
TANGGAL : 21 JUNI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Pos 78711

Jalan Pendidikan No. Putusibau Kode Pos 78711

Telp. (0567) 21133 Fax. (0567) 21133

Website : inspektora.kapuashulukab.go.id Email : inspektora@kapuashulukab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor : 700.1.2.7/108/LHE/INKAB/IB-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

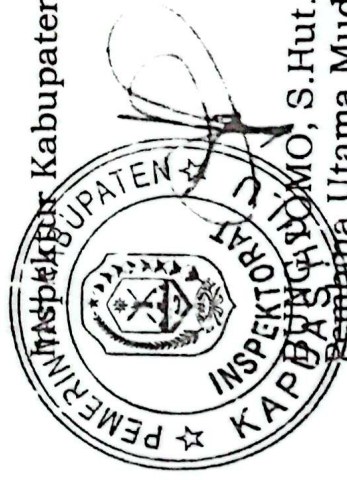
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

BAB III
PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Penduduk.

Putussibau, 21 Juni 2024

Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu



INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU
Putussibau, 21 Juni 2024
NIP. 19700604 199803 1 009

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,0	19,2	19,2
2	Pengukuran Kinerja	30,0	17,4	17,4
3	Pelaporan Kinerja	15,0	9,3	9,3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,0	15,5	15,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja			61,4	61,4
			B	B

No	Catatan
1	Perencanaan Kinerja
a.	Perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja secara lengkap dan cukup mencakup rencana strategis 2021-2026, rencana kerja tahun 2023, dan perjanjian kinerja tahun 2023 dari para personil perangkat daerah juga disertai dokumen pendukung berupa pohon kinerja dan dokumen cascading
b.	Dokumen Rencana Strategis 2021-2026, Rencana Kerja tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan walaupun tidak tepat waktu
c.	Dokumen perencanaan aktivitas belum sepenuhnya mendukung kinerja
d.	Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan kinerja antar level jabatan dengan baik, misalnya kausalitas antara persentase penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada level eselon II dengan jumlah perempuan terlibat di lembaga pemerintahan, jumlah perempuan mendapatkan pelatihan dan nilai capaian Kabupaten Layak Anak pada level eselon III
e.	Rumusan hasil dan indikator kinerja yang jelas pada perangkat daerah belum diimplementasikan sampai pada tataran program dan kegiatan. Perangkat daerah belum dapat menyajikan secara jelas korelasi yang berkesinambungan secara berjenjang dari IKU perangkat daerah sampai dengan output kegiatan. Hal ini terjadi karena indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan belum didefinisikan
2.	Pengukuran Kinerja
a.	SOP Pengumpulan Data Kinerja yang digunakan perangkat daerah belum memberikan pedoman tentang bagaimana cara masing-masing level jabatan memperoleh data kinerja
b.	Perangkat daerah telah memiliki definisi operasional yang jelas untuk mengukur indikator kinerja sampai pada level jabatan koordinator, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan kesinambungan indikator kinerja antar jenjang. Hal ini merupakan akibat dari kurang selaras indikator kinerja antar level pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan

c.	Perangkat daerah belum memiliki pedoman yang mengatur cara mendapatkan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan
d.	Pengukuran kinerja belum didukung dengan data kinerja yang dapat diandalkan akibat belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai serta belum dilaksanakannya pengukuran kinerja kegiatan
e.	Masih terdapat pengukuran kinerja yang tidak berpedoman pada definisi operasional yang ditetapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah mengenai IKU.
f.	Pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian strategi/kebijakan/anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Pengukuran kinerja yang dilakukan belum dapat memberikan informasi akurat mengenai permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam upaya mencapai kinerja sehingga perangkat daerah tidak dapat melakukan perubahan aksi yang tepat guna mengatasi permasalahan yang ada
3.	Pelaporan Kinerja
a.	Perangkat daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 per tanggal 31 Januari 2024 dan telah disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada tanggal 13 Maret 2024
b.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 belum menginformasikan hambatan atas upaya pencapaian kinerja, dan rekomendasi perbaikan kinerja secara memadai.
c.	Substansi yang disajikan dalam laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan karena masih terdapat analisis permasalahan dan pembentukan solusi yang kurang memadai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a.	Perangkat daerah telah secara konsisten memasukkan topik pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah dalam setiap kesempatan monitoring dan evaluasi triwulanan
b.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Upaya-upaya spesifik yang perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah guna memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah kurang mendapatkan pembahasan dalam rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
c.	Implementasi SAKIP perangkat daerah telah meningkat karena telah terdapat hasil dari usaha perangkat daerah untuk melanjutkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya

No	Rekomendasi
1	Menguraikan secara jelas dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;
2	Memperbaiki keselarasan antar dokumen perencanaan yang digunakan, serta keselarasan kinerja antar jenjang jabatan;
3	Melengkapi indikator dan target kinerja pada tataran program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran;
4	Melengkapi pedoman pengukuran kinerja dengan tata cara mendapatkan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan;
5	Melaksanakan pengukuran kinerja kegiatan serta menyediakan data kinerja yang dapat diandalkan;
6	Mematuhi penetapan IKU dan IKI dalam melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah;
7	Menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja;
8	Meningkatkan kualitas analisis terhadap permasalahan pencapaian kinerja dalam kegiatan pengukuran maupun pelaporan kinerja sehingga dapat menghasilkan tindakan solusi yang tepat.
9	Menindaklanjuti upaya perbaikan kinerja/solusi yang dirumuskan dalam LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
10	Melaksanakan aksi/tindakan yang diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta memonitoring perkembangannya.
11	Melakukan penilaian mandiri atas akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah.

**DATA PERHITUNGAN REALISASI KADIS
TRIWULAN III**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA		
1	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah yang mendapat PKH		Orang
		jumlah peserta PBI JKN triwulan 3	1.418	Orang
		Jumlah DTKS	102.918	Orang

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Kapuas Hulu



[Signature]
MARTHA BANANG, SH.MM
NIP. 19651123 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78711
Laman: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
Pos-el : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

REKAPAN DATA KASUS YANG TERSELESAIKAN Sampai Dengan TW 3

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KEKERASAN	TGL PELAPORAN DI KEPOLISIAN	TGL PUTUSAN TETAP DI PENGADILAN NEGERI
1	Anastasia Nuraica	Silat Hilir	Seksual (Anak)	6 Januari 2024	Proses Putusan
2	Indah	Putussibau Utara	Seksual (Anak)	15 Februari 2024	(selesai) 31 Juli 2014
3	Anggun Risqia	Jongkong	Seksual (Anak)	21 Februari 2024	(selesai) 17 Juli 2024
4	Mariana Dia	Bika	Seksual (Anak)	26 Februari 2024	(selesai) 4 Juli 2024
5	Utami Budi Atri	Putussibau Selatan	Fisik (Dewasa)	1 Maret 2024	Proses Putusan
6	Chelsie	Suhaid	Seksual (Anak)	17 April 2024	Proses Putusan
7	Amalia Wiguna	Putussibau Selatan	KDRT	8 Mei 2024	(selesai) 22 Agustus 2024
8	Rismayana	Bunut Hilir	Seksual (Anak)	11 Mei 2024	Proses Putusan

en
nt
ek

lasi
SNC
ada
Des

isi
it

9	Tiwi	Kalis	Seksual (Anak)	13 Mei 2024	(Selesai) 30 Mei 2024
10	Susanti	Mentebah	Seksual (Anak)	12 Juni 2024	Proses Putusan
11	Riska Julianti	Bunut Hulu	Seksual (Anak)	28 Agustus 2024	Belum Selesai

a.n Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabid PPA



EMERITA LALONG, S.Pd

Pembina

NIP. 1960316 199303 2 005

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Triwulan ini	% capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya Impelementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B		0	B	0	100,00	100,00	Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2023 tgl 21 Juni 2024 perolehan 61.40 kategori B (Baik)	Menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam rangka penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dan efektif.
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85	82,83	1,23	1,38	0,00	85,43	100,51	Data penerima Bantuan Pusat (kementerian) masih perlu di perbaiki.	Melakukan verifikasi dan validasi perbulan melalui Aplikasi SIKSNG serta melakukan pelatihan terhadap Operator SIKSNG yang ada di Desa
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	74	0%	5,88	23,5	17,6	47,06	63,59	- Terdapat 14 kasus yang masuk dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2024, dari 14 kasus yang masuk baru 8 kasus sudah terselesaikan terdiri 2 kasus Dewasa(KDRT) ; 5 Kasus Anak (seksual) dan 1 Kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Masih ada 6 kasus dalam proses Pengadilan Negeri	- Memfolow up dan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri terkait Putusan Pengadilan
			159,00					132,49	83,33		

Putussibau, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kapuas Hulu



**DATA PERHITUNGAN REALISASI KADIS
TRIWULAN IV**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA		
1	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah yang mendapat PKH	-	Orang
		Jumlah peserta PBI JKN triwulan 4	-	Orang
		Jumlah DTKS	102.918	Orang



Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Kapuas Hulu

MARTHA BANANG, SH.MM
NIP. 19651123 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78711
Laman: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
Pos-el : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

REKAPAN DATA KASUS YANG TERSELESAIKAN Sampai Dengan TW 4

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KEKERASAN	TGL PELAPORAN DI KEPOLISIAN	TGL PUTUSAN TETAP DI PENGADILAN NEGERI
1	Anastasia Nuraica	Silat Hilir	Seksual (Anak)	6 Januari 2024	Proses Putusan
2	Indah	Putussibau Utara	Seksual (Anak)	15 Februari 2024	(selesai) 31 Juli 2014
3	Anggun Risqia	Jongkong	Seksual (Anak)	21 Februari 2024	(selesai) 17 Juli 2024
4	Mariana Dia	Bika	Seksual (Anak)	26 Februari 2024	(selesai) 4 Juli 2024
5	Utami Budi Atri	Putussibau Selatan	Fisik (Dewasa)	1 Maret 2024	Proses Putusan
6	Chelsie	Suhaid	Seksual (Anak)	17 April 2024	(selesai) 3 Desember 2024
7	Amalia Wiguna	Putussibau Selatan	KDRT	8 Mei 2024	(selesai) 22 Agustus 2024
8	Rismayana	Bunut Hilir	Seksual (Anak)	11 Mei 2024	(selesai) 4 November 2024
9	Tiwi	Kalis	Seksual (Anak)	13 Mei 2024	(Selesai) 30 Mei 2024
10	Susanti	Mentebah	Seksual (Anak)	12 Juni 2024	(selesai) 21 November 2024
11	Riska Julianti	Bunut Hulu	Seksual (Anak)	28 Agustus 2024	Proses Putusan

12	Wulan Andriani	Silat Hulu	Seksual (Anak)	30 Oktober 2024	Proses Putusan
13	Yanti	Putussibau Utara	KDRT	1 Desember 2024	Proses Putusan
14	Neli	Putussibau Utara	TPPO	11 Desember 2024	Proses Putusan

a.n Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabid PPA,



EMERITA LALONG, S.Pd

Pembina

NIP. 1960316 199303 2 005